



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM AGRARIA	211B1313	3	WN	HPDT	III
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & P		
	Tanda Tangan Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum				
KK2	Mampu melakukan mediasi dan negosiasi (non-litigasi)				
KK3	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum				
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil				
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR					
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan, konsep dasar hukum agraria serta memiliki keterampilan dalam mempraktikkan metode dan konsep hukum untuk menemukan, menganalisis dan memecahkan masalah hukum agraria, sekaligus memberikan alternatif pemecahan masalah hukum agraria tersebut.					

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian hukum agraria, aspek-aspek hukum agraria, baik dari segi hukum positif maupun dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, sejarah dualisme hukum agraria (hukum tanah Barat dan hukum tanah adat) pada masa kolonial, sejarah terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), asas-asas yang mendasari pelaksanaan UUPA, hak menguasai negara perbedaannya dengan Domein Verklaring, hak ulayat, politik hukum agraria dan perkembangan politik hukum agraria, hak-hak atas tanah menurut UUPA meliputi: konsepsi hukum tanah nasional, pemilikan, peralihan dan pendaftarannya, land reform dan land use, penataan pemanfaatan tanah untuk berbagai penggunaan serta sengketa pertanahan

GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP)

Pertemuan Ke:	Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/Kriteria Penilaian	BOBOT NILAI (%)
I	<p>Konsensus mengenai berbagai aspek yang akan dilakukan selama satu semester kuliah</p> <p>Mahasiswa mampu mengemukakan beberapa istilah/pengertian hukum agraria, ruang lingkup hukum agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendahuluan 1. Penjelasan tentang GBRP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Pembentukan Kelompok - Istilah/Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Agraria <ul style="list-style-type: none"> a. Istilah-istilah/Pengertian b. Ruang Lingkup Hukum Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen sinergitas dosen mahasiswa - Kontrak Pembelajaran - Kuliah Interaktif - Penelusuran Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan - Ketepatan menguraikan istilah hukum agraria, ruang lingkup hukum agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 	2
II	<p>Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan karakter hukum agraria berdasarkan periodisasi berlakunya hukum agraria, yang meliputi masa sebelum berlakunya UUPA dan setelah berlakunya UUPA.</p>	<p>Periodisasi Perkembangan Hukum Agraria</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelum berlakunya UUPA <ul style="list-style-type: none"> 1. Hukum Adat 2. Masa Kerajaan 3. Masa Penjajahan (Inggris, Hindia Belanda dan Jepang) 4. Masa Kemerdekaan b. Masa Kemerdekaan setelah berlakunya UUPA 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Small group discussion 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas dan diskusi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Penguasaan materi diskusi - Kedisiplinan dan sopan santun 	5
III	<p>Mahasiswa mampu mengaitkan fungsi dan tujuan UUPA, hubungan fungsional UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional dengan Hukum Tanah Adat, Konsepsi Hukum Tanah Barat, Feodal, dan Hukum Tanah Nasional.</p>	<p>Pembentukan UUPA dan Pembangunan Hukum Tanah Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi UUPA b. Tujuan UUPA c. Hubungan Fungsional UUPA dengan Hk Adat <p>Konsepsi Hukum Tanah (Tanah Barat, Tanah Feodal, Tanah Nasional)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Review 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Kemampuan mengemukakan pendapat - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan 	5

				sopan santun	
IV	Mahasiswa mampu menguraikan faktor-faktor perlunya pembentukan UUPA, tahapan-tahapan penyusunan UUPA.	Sejarah Penyusunan UUPA a. Penyusunan Hk Agraria Nasional b. Tahapan Penyusunan UUPA 1. Panitia Agraria Yogya 2. Panitia Agraria Jakarta 3. Panitia Agraria Soewahjo 4. Rancangan Soenarjo 5. Rancangan Sadjarwo c. Peraturan dan Keputusan yang dicabut.	1. Kuliah Interaktif 2. Small group discussion, 3. Quiz and Review	- Kehadiran - Keaktifan dalam kelas dan diskusi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Penguasaan materi diskusi - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Ketepatan menjawab soal kuis - Kedisiplinan dan sopan santun	5
V	Mahasiswa mampu menelaah prinsip-prinsip dasar hukum agraria dalam kasus konkrit.	Prinsip-prinsip Dasar Hukum Agraria dalam UUPA	1. Kuliah Interaktif 2. Tugas Mandiri	- Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menelaah prinsip-prinsip dasar hukum agraria dalam kasus konkrit - Kedisiplinan dan sopan santun	5
VI-VII	Mahasiswa mampu mengelompokkan dan mengaplikasikan Hak-hak Penguasaan Atas Tanah sesuai dengan permasalahan hukum agraria dalam masyarakat.	Hak-hak Penguasaan Atas Tanah a. Hak-Hak Penguasaan b. Hierarki Hak-hak Penguasaan c. Hak-hak atas tanah yang bersifat Tetap (pasal 16 UUPA) - Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka	1. Kuliah Interaktif 2. Tugas Mandiri 3. Tugas Kelompok	- Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam mengelompokkan hak-hak penguasaan atas tanah, baik tugas individu maupun berkelompok - Kedisiplinan dan sopan santun	15

		Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan d. Hak-hak atas tanah yang bersifat Sementara (pasal 53 UUPA)			
VIII	MID TEST		Ujian Tulis	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjawab soal - Kejujuran dalam mengerjakan soal 	5
IX	Mahasiswa mampu mengaitkan ketentuan hukum terkait dengan penyediaan tanah dan mampu memecahkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan penyediaan tanah di masyarakat.	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan a. Fungsi Tanah b. Tatacara Perolehan Tanah c. Permohonan Hak Atas Tanah d. Tatacara Pembatalan Hak Atas Tanah e. Tatacara pemberian izin peralihan Hak Atas Tanah f. Tatacara perpanjangan jangka waktu Uang Pemasukan g. Pemindahan Hak h. Pelepasan hak i. Pencabutan Hak Atas Tanah	1. Kuliah Interaktif 2. Tugas Mandiri 3. Tugas Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam mengaitkan ketentuan hukum terkait dengan penyediaan tanah dan ketepatan dalam memecahkan permasalahan hukum pelaksanaan penyediaan tanah, baik tugas individu maupun berkelompok - Kedisiplinan dan sopan santun 	8
X	Mahasiswa mampu mengemukakan dan menjelaskan Istilah/pengertian, dasar hukum, landasan dan tujuan pembangunan rumah susun, dan mampu mengidentifikasi hak atas tanah yang dapat didirikan rumah susun, pemilikan rumah susun, prosedur penerbitan hak milik	Hak Milik Satuan Rumah Susun a. Dasar Hukum b. Pengertian c. Ruang lingkup HMSRS d. (Bagian bersama, Tanah bersama, benda bersama dan pendaftaran). e. Prosedur Penerbitan HMSRS f. Peralihan HMSRS g. Hak dan Kewajiban Pemilik	1. Kuliah Interaktif 2. Review	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan dalam kelas dan diskusi - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun 	5

	satuan rumah susun, pembebanannya, perhimpunan penghuni.	Satuan Rumah Susun. h. Pembebanan HMSRS i. Perhimpunan Penghuni.			
--	--	--	--	--	--

XI	Mahasiswa mampu menjelaskan Istilah dan Pengertian, Tujuan Landreform, Dasar Hukum, dan mengkorelasikan dengan program-program Landreform.	Landreform a. Dasar Hukum b. Istilah dan Pengertian c. Tujuan Landreform d. Program Landreform e. Perbandingan pelaksanaan Landreform dengan negara lain	1. Kuliah Interaktif 2. Review	- Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun	5
XII	Mahasiswa mampu menjelaskan Tujuan dan Sistem Publikasi dalam pendaftaran tanah serta mengaitkan dengan, Peranan Kepala Desa dan PPAT dalam Pendaftaran Tanah untuk memberikan kepastian hukum.	Pendaftaran Tanah a. Dasar hukum, b. Pengertian, c. Asas dan Tujuan, d. Objek e. Sistem Pendaftaran dan Publikasi PT f. Peran Kepala Desa dan PPAT g. Sertifikasi tanah gratis (LMPDP, Prona, SMS, Larasati)	1. Kuliah Interaktif 2. Small group Discussion	- Kehadiran - Keaktifan dalam kelas dan diskusi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Penguasaan materi diskusi - Kedisiplinan dan sopan santun	5
XIII	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaitkan dasar hukum dan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan mampu mengidentifikasi perbedaan dengan pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.	Pengadaan Tanah dan Pencabutan hak Atas Tanah a. Pengertian b. Panitia, Munyawarah, Ganti Kerugian Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah c. Pengadaan Tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Pencabutan Hak Atas Tanah	1. Kuliah Interaktif 2. Review	- Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun	5
XIV	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian;	Tanah Sebagai Jaminan Kredit a. Hak Jaminan Atas Tanah	1. Kuliah Interaktif 2. Review	- Kehadiran - Keaktifan dalam	5

	dasar hukum dan asas-asas tanah sebagai jaminan kredit dan menerapkannya dalam praktik pembebanan hak tanggungan serta eksekusinya.	dalam UUPA b. Pemberi dan Penerima Hak Tanggungan c. Proses Pembebanan Hak Tanggungan d. Beralih dan hapusnya Hak Tanggungan e. Eksekusi Hak Tanggungan		kelas - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun	
XV	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Dasar Hukum Sumber Daya Alam secara umum dan mampu mengidentifikasi sumber-sumber daya alam secara khusus, serta hak-hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam.	a. Hak Atas Sumber Daya Alam Pertambangan b. Hak Menguasai Negara atas SDA Pertambangan c. Hak dan Kewajiban Negara dan Masyarakat serta dunia usaha atas SDA Pertambangan	1. Kuliah Interaktif 2. Review	- Kehadiran - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab review materi sebelumnya - Kedisiplinan dan sopan santun	5
XVI	FINAL TEST		Ujian Tulisan	- Ketepatan menjawab soal - Kejujuran dalam mengerjakan soal	20

Buku Acuan:

- 1 Akhmad Fauzi. 2005. **Kebijakan Perikanan dan Kelautan (isu, Sintesis, dan Gagasan)**. Gramedia, Jakarta.
- 2 Arie Sukanti Hutagalung. 2008. **Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan**. Rajawali Pers, Jakarta.
- 3 Arie Wahyono, dkk. 2000. Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia. Media Pressindo, Yogyakarta.
- 4 Bushar. 1988. Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Pengantar. Pradya Paramitha, Jakarta.
- 5 Boedi Harsono, 2003 Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta.
- 6 Baharuddin Lopa. 1982. **Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan**. Alumni, Bandung.
- 7 Christy dan A. Scott, 1986. **Sifat dari Sumber Daya Alam Milik Bersama** (Ekonomi Perikanan: Dari Teori dan Praktek).
- 8 Dahuri, J.Ginting dan Sitepu. 1996. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**. Gramedia, Jakarta.
- 9 Farida Patittingi. 2009. **Pengaturan Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil di Indonesia**. Penerbit Lentera, Jakarta.
- 10 Firial Marahuddin. 1986. **Ekonomi Perikanan**. Gramedia, Jakarta.
- 11 E. Likadja. 1988. **Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan**. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- 12 Mochtar Kusumaatmadja. 1986. **Bunga Rampai Hukum Laut**. Bina Cipta, Bandung.
- 13 Sudirman Saad. 2003. **Politik Hukum Perikanan Indonesia**. Lembaga Sentral Pembiayaan Masyarakat
- 14 _____ . 2009. **Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan**. PT.LKIS Printing Cemerlang, Yogyakarta
- 15 Sri Susyanti Nur. 2010. **Hak Guna Laut dalam Usaha Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan**.Pustaka P
- 16 Victor P.H. Nikijuluw. 2002. **Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**. Pustaka Cidesindo, Jakarta